



Pengaruh Teknologi Informasi, Literasi Keuangan Pengguna Dan Kolaborasi Stakeholder Terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Periode 2022-2024 Di Kabupaten Wonogiri

Okta Ginanjar Astuti^{1*}, Susilaningtyas², Syahriar Abdullah³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta

Korespondensi penulis: oktaginanjara06@gmail.com

Abstract : *This research aims to evaluate the implementation of the Regional Government Credit Card (KKPD) in Wonogiri Regency from 2022 to 2024 by analyzing the impact of information technology, financial literacy of users and stakeholder collaboration on the success of KKPD implementation. The background of this study is the government's effort to improve the efficiency, transparency and accountability of regional financial management through the digitalization of financial transactions with KKPD, despite facing technical and non-technical challenges. The research method used is a quantitative approach with a survey involving officials who are involved in the management of KKPD in the Regional Work Units (OPD) of Wonogiri Regency, with descriptive analysis to describe the results obtained. The results show that information technology, financial literacy of users and stakeholder collaboration play an important role in supporting the success of KKPD implementation, although there are several challenges that need to be addressed to improve the effectiveness of this system.*

Keywords : *Regional Government Credit Card; Information Technology; Financial Literacy; Stakeholder Collaboration; KKPD implementation*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Wonogiri pada periode 2022 hingga 2024 dengan menganalisis pengaruh teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi stakeholder dalam kesuksesan implementasi KKPD. Latar belakang penelitian ini adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui digitalisasi transaksi keuangan dengan KKPD, meskipun masih ada kendala teknis dan non-teknis dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan survei yang melibatkan pejabat yang terlibat dalam pengelolaan KKPD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri dengan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi stakeholder memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi KKPD meskipun terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan efektivitas sistem ini.

Kata Kunci : Kartu Kredit Pemerintah Daerah; Teknologi Informasi; Literasi Keuangan; Kolaborasi Stakeholder; Implementasi KKPD

1. LATAR BELAKANG

Upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik tercermin dalam pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah digitalisasi transaksi keuangan melalui sistem pembayaran non-tunai. Transformasi digital di bidang pemerintahan menjadi suatu kebutuhan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi. Salah satu bentuk nyata dari transformasi ini adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang bertujuan untuk meminimalkan penyimpangan, mempercepat transaksi, serta meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan keuangan pemerintah daerah

(Haryono, 2020). Kebijakan ini dilandasi oleh sejumlah regulasi, termasuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 yang memberikan panduan tentang implementasi transaksi non-tunai serta penggunaan KKPD dalam pelaksanaan anggaran daerah.

Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan instrumen pembayaran non-tunai yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi transaksi belanja barang dan jasa. Penggunaan KKPD bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengeluaran pemerintah daerah. Kebijakan ini juga sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Wonogiri No. 20 Tahun 2024 tentang Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang memperkuat komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan transparan.

Salah satu tujuan utama penerapan KKPD adalah untuk mendukung pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan sistem yang lebih modern dan terintegrasi. Penggunaan KKPD diharapkan dapat mengurangi potensi idle cash yang sering muncul akibat penggunaan Uang Persediaan (UP) secara tunai, serta mempermudah pencatatan dan pengawasan atas realisasi anggaran. Dengan demikian KKPD menjadi alat penting untuk memastikan pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan transparan, yang menjadi tujuan utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada prinsip *good governance*.

Namun demikian meskipun regulasi pendukung sudah ada, penerapan KKPD di beberapa daerah termasuk Kabupaten Wonogiri menghadapi sejumlah tantangan teknis maupun non-teknis. Kendala yang sering muncul antara lain terkait dengan infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, serta rendahnya literasi keuangan di kalangan pengguna yang mempengaruhi pemahaman dan pengelolaan penggunaan KKPD. Masalah lainnya termasuk adanya resistensi terhadap sistem baru dari pegawai yang sudah terbiasa dengan metode pembayaran manual.

Selain itu integrasi sistem antara berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, bank dan penyedia barang/jasa, juga menjadi tantangan utama dalam implementasi KKPD. Proses yang tidak terintegrasi dengan baik menyebabkan kesulitan dalam sinkronisasi data dan pengawasan transaksi yang pada akhirnya mempengaruhi

efektivitas implementasi sistem pembayaran ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Gading (2023), penggunaan KKPD oleh pemerintah daerah di Indonesia secara nasional masih terbilang rendah, dengan beberapa daerah menghadapi kendala dalam adopsi sistem pembayaran non-tunai ini.

Sebelum penerapan KKPD, pengelolaan keuangan di Kabupaten Wonogiri masih bergantung pada sistem pembayaran tunai melalui Uang Persediaan (UP). Sistem ini meskipun sudah berjalancenderung memperlambat proses administrasi dan meningkatkan risiko penumpukan dana yang tidak terpakai (*idle cash*)serta mempermudah terjadinya penyalahgunaan dana. Dengan adanya KKPD diharapkan pengelolaan keuangan menjadi lebih efisien dan transparan, serta mengurangi risiko tersebut. Namun keberhasilan penerapan KKPD di Kabupaten Wonogiri masih perlu dipertimbangkan dengan baik, terutama terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia yang terlibat dalam operasionalisasi sistem ini.

Penerapan KKPD di Kabupaten Wonogiri menghadapi sejumlah kendala termasuk infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai. Hal ini mengakibatkan kesalahan sistem dan keterbatasan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi. Meskipun percepatan implementasi KKPD telah dilakukan sejak 2022, sistem ini belum sepenuhnya diterapkan di seluruh OPD dan masih ada masalah teknis, seperti tagihan KKPD yang tidak masuk email atau aplikasi CMS yang menghambat proses administrasi (Akhmadi et al., 2023).

Berbagai penelitian telah mengkaji implementasi KKPD dan tantangan yang dihadapi. Harits (2021) mengidentifikasi kendala utama berupa disinkronisasi regulasi dan konflik norma, seperti ketidaksesuaian pengaturan jatuh tempo pembayaran tagihan. Di sisi lain Sriyani et al., (2022) menemukan bahwa penerapan KKPD memberikan dampak positif seperti pengurangan *idle cash* dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan Uang Persediaan, meskipun terkendala terbatasnya pemilik QRIS dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten. Sementara itu Akhmadi et al. (2023) menunjukkan bahwa penggunaan KKP dapat meningkatkan literasi keuangan instansi pemerintah melalui pendekatan *role model*.Melihat latar belakang tersebut, timbul pertanyaan apakah penerapan solusi yang berhasil di daerah lain dapat diadaptasi secara efektif di Kabupaten Wonogiri dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi antara berbagai

stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan implementasi KKPD di Kabupaten Wonogiri dan memberikan rekomendasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Dengan demikian judul penelitian ini adalah "Pengaruh Teknologi Informasi, Literasi Keuangan Pengguna dan Kolaborasi Stakeholder Terhadap Implementasi KKPD Periode 2022–2024 di Kabupaten Wonogiri".

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem pembayaran di sektor pemerintahan, termasuk pemerintah daerah, menuju mekanisme berbasis digital. Salah satu inovasi yang menonjol dalam hal ini adalah penggunaan sistem pembayaran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang memanfaatkan platform digital untuk memproses transaksi belanja secara non-tunai. Beberapa faktor penting yang mendukung implementasi KKPD adalah teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi stakeholder.

Pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah dalam pelaksanaan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam praktiknya, sistem pembayaran tunai sering menimbulkan keterlambatan administrasi dan risiko ketidakefisienan. Karena itu, pemerintah mendorong transformasi ke arah digitalisasi melalui kebijakan transaksi non-tunai yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 serta Permendagri Nomor 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD. Di tingkat daerah, kebijakan ini diperkuat oleh Perda Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2022 dan Perbup Wonogiri Nomor 20 Tahun 2024 yang menegaskan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang modern dan efisien.

Secara teoritis, keuangan daerah berperan sebagai instrumen utama dalam mendukung fungsi pemerintahan dan pembangunan. Untuk mewujudkan tata kelola yang baik, daerah perlu menerapkan sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel melalui dukungan teknologi serta koordinasi antar pihak yang terlibat. Di sinilah KKPD menjadi alat strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai dan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran (Akhmadi et al., 2023; Sriyani et al., 2022).

Faktor literasi keuangan pengguna juga menjadi kunci dalam keberhasilan penerapan KKPD. Berdasarkan POJK Nomor 76/POJK.07/2016, literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan seseorang dalam mengelola

keuangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemahaman aparatur terhadap prosedur penggunaan KKPD dan tata kelola keuangan digital akan memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan ini (Mujianur et al., 2025). Penelitian Akhmadi et al. (2023) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan yang baik mampu meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan anggaran.

Selain itu, kolaborasi antarstakeholder merupakan unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan transparan. Kolaborasi ini melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Menurut Sitorus & Sari (2021) kerja sama yang sinergis antara sektor publik dan swasta dapat menciptakan sistem pengawasan yang lebih kuat serta mendukung terciptanya inovasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Teknologi informasi dalam penelitian ini berperan sebagai fondasi utama dalam mendukung efektivitas implementasi KKPD. Teknologi ini mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi yang mampu mengolah serta menyajikan data secara cepat dan akurat. Seperti dijelaskan oleh Fanitra & Junaidi (2020) serta Suryadi (2019), pemanfaatan teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan dan mempercepat proses administrasi publik. Namun, kesiapan infrastruktur dan keamanan data tetap menjadi faktor yang harus diperhatikan agar sistem dapat berjalan optimal.

Dengan demikian, landasan teori dalam penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) tidak hanya bergantung pada kebijakan regulatif, tetapi juga pada kesiapan teknologi informasi, tingkat literasi keuangan pengguna, dan kolaborasi efektif antar-stakeholder dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif untuk mengevaluasi implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Wonogiri. Pendekatan kuantitatif dipilih karena bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh faktor-faktor seperti teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi stakeholder terhadap keberhasilan implementasi KKPD. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang ada terkait

implementasi KKPD dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam penerapannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan KKPD di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonogiri. Sampel penelitian dipilih secara purposive dengan kriteria pejabat yang memiliki pemahaman dan pengalaman langsung dalam penggunaan KKPD. Penentuan sampel dilakukan berdasarkan peran dan tanggung jawab mereka dalam pengelolaan anggaran dan transaksi yang melibatkan KKPD. Sebanyak 53 responden dipilih sebagai sampel yang akan memberikan informasi terkait implementasi KKPD dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik survei menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur persepsi dan pemahaman responden tentang teknologi informasi, literasi keuangan, dan kolaborasi stakeholder dalam implementasi KKPD. Kuesioner terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mengukur variabel-variabel penelitian secara spesifik dengan menggunakan skala Likert untuk menilai sejauh mana responden setuju atau tidak setuju.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk menggambarkan distribusi dan karakteristik variabel yang diteliti. Dengan analisis ini diketahui tingkat pemahaman dan kesiapan pengguna KKPD serta hambatan dalam penerapannya. Teknik analisis regresi linier sederhana digunakan untuk menguji hubungan antar variabel sehingga dapat diketahui seberapa besar pengaruh teknologi informasi, literasi keuangan dan kolaborasi stakeholder terhadap efektivitas implementasi KKPD di Kabupaten Wonogiri.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi KKPD dengan koefisien regresi sebesar 0.465 dan nilai signifikansi 0.003, yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah seperti penggunaan Cash Management System (CMS) dan aplikasi digital lainnya, maka semakin besar keberhasilan implementasi KKPD di Kabupaten Wonogiri.

Teknologi informasi mempermudah pencatatan transaksi, mempercepat pengelolaan anggaran dan meningkatkan transparansi administrasi, yang semuanya berkontribusi pada efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Namun implementasi teknologi informasi juga menghadapi tantangan besar terkait infrastruktur yang tersedia, seperti keterbatasan konektivitas internet yang mempengaruhi kelancaran transaksi. Keterbatasan pada perangkat keras dan ketergantungan pada sistem tertentu masih menjadi hambatan dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. Meski demikian penggunaan teknologi yang tepat dapat mempercepat aliran kas daerah dan mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai sehingga meningkatkan efektivitas sistem pembayaran.

Berdasarkan temuan ini, disarankan agar Pemerintah Kabupaten Wonogiri lebih fokus pada pengembangan infrastruktur teknologi, terutama dengan mengoptimalkan sistem CMS yang ada dan memperkenalkan perangkat digital yang lebih canggih dan terintegrasi. Pelatihan intensif bagi pegawai pemerintah daerah dalam penggunaan teknologi baru juga menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan memberikan manfaat yang maksimal dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

B. Pengaruh Literasi Keuangan Pengguna Terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa literasi keuangan pengguna berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi KKPD dengan koefisien sebesar 0.498 dan nilai t sebesar 3.160 dengan signifikansi $0.003 < 0.05$. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat literasi keuangan pengguna, semakin besar potensi keberhasilan implementasi KKPD di Kabupaten Wonogiri. Literasi keuangan yang lebih baik memungkinkan pegawai pemerintah untuk memahami prosedur penggunaan KKPD, yang pada gilirannya mengurangi kesalahan dalam pencatatan transaksi dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Meskipun demikian tantangan yang dihadapi adalah masih rendahnya tingkat literasi keuangan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang menghambat efektivitas implementasi KKPD. Pemahaman yang rendah mengenai pengelolaan anggaran daerah dan penggunaan teknologi informasi dapat memperlambat penerapan sistem pembayaran non-tunai. Oleh karena itu diperlukan upaya yang lebih intensif dalam

meningkatkan literasi keuangan melalui pelatihan mengenai perencanaan anggaran dan penggunaan KKPD secara efisien.

Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Wonogiri mengadakan pelatihan yang lebih mendalam mengenai pengelolaan anggaran daerah dan prosedur penggunaan KKPD bagi seluruh pegawai, terutama terkait perencanaan keuangan dan pengelolaan anggaran. Dengan meningkatkan literasi keuangan pada kedua aspek ini, diharapkan implementasi KKPD dapat mempercepat tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif dan transparan.

C. Pengaruh Kolaborasi Stakeholder Terhadap Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kolaborasi stakeholder memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi KKPD dengan koefisien regresi sebesar 0.277 dan nilai t sebesar 2.182 dengan signifikansi $0.034 < 0.05$. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, bank dan pihak terkait lainnya sangat penting dalam mendukung implementasi KKPD. Koordinasi yang efektif antar stakeholder dapat memperlancar proses implementasi KKPD dan meningkatkan efektivitas kebijakan dalam pengelolaan anggaran daerah, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama pada peran dan tanggung jawab masing-masing.

Selain itu komunikasi yang jelas antar stakeholder juga memainkan peran kunci dalam meningkatkan koordinasi dan mengurangi kebingungan yang dapat memperlambat proses implementasi. Koordinasi yang buruk dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu penting untuk memperkuat komunikasi antar stakeholder agar setiap pihak memahami tanggung jawab dan prioritas mereka dalam pengelolaan anggaran daerah.

Disarankan agar Pemerintah Kabupaten Wonogiri memperkuat komunikasi antar stakeholder dengan mengadakan forum diskusi dan pelatihan yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pihak bank dan lembaga keuangan. Dengan meningkatkan partisipasi dan komunikasi diharapkan implementasi KKPD dapat berjalan lebih lancar, mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan dan akuntabel.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi, literasi keuangan pengguna dan kolaborasi stakeholder berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Wonogiri. Teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efektivitas implementasi KKPD, di mana infrastruktur yang lebih baik seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang mendukung, mempermudah pengelolaan transaksi keuangan dan pencatatan data. Namun kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil masih menjadi penghambat utama dalam kelancaran transaksi. Selain itu literasi keuangan pengguna juga berpengaruh besar terhadap keberhasilan sistem ini, di mana pemahaman yang cukup tentang pengelolaan keuangan dan prosedur penggunaan KKPD sangat penting untuk mengoptimalkan penerapannya. Kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, bank, dan pihak terkait lainnya juga memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran implementasi KKPD.

Walaupun ketiga faktor ini memberikan pengaruh yang signifikan, analisis data menunjukkan bahwa mereka hanya menjelaskan 49,2% dari variasi dalam implementasi KKPD. Ini menunjukkan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem ini yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, meskipun teknologi informasi, literasi keuangan, dan kolaborasi stakeholder sangat berperan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek lainnya untuk meningkatkan efektivitas implementasi KKPD di masa depan. Faktor-faktor eksternal lainnya yang belum teridentifikasi dalam penelitian ini, seperti kebijakan pemerintah, budaya organisasi, atau faktor sosial, dapat berperan penting dalam mempercepat proses digitalisasi keuangan daerah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diberikan untuk meningkatkan implementasi KKPD di Kabupaten Wonogiri. Pemerintah daerah disarankan untuk lebih fokus pada peningkatan infrastruktur teknologi terutama dalam hal jaringan internet yang lebih stabil dan perangkat yang mendukung penggunaan sistem keuangan digital. Peningkatan literasi keuangan di kalangan pegawai juga menjadi hal yang sangat penting, dengan mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan anggaran dan prosedur penggunaan KKPD secara efisien. Selain itu kolaborasi antar stakeholder juga harus diperkuat dengan membentuk roadmap yang lebih terstruktur untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Kabupaten Wonogiri, khususnya pada OPD yang terlibat langsung dalam penerapan KKPD, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi untuk seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian yang hanya mengandalkan wawancara dan observasi terbatas juga mengurangi variasi kendala teknis yang mungkin muncul di waktu yang lain. Penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas dan variabel tambahan, seperti budaya organisasi dan komunikasi antar stakeholder, diperlukan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi KKPD di tingkat daerah yang lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

- Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2). <https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172>
- Fanitra, I., & Junaidi, R. (2020). Pengaruh Teknologi Informasi dan Komitmen Pelayanan terhadap Good Governance di Jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi*, 4(1). <https://doi.org/10.35870/emt.v4i1.138>
- Gading, S. (2023, October 3). Pemda Disebut Masih Jarang Pakai Kartu Kredit Pemerintah, Ada Apa? . *DetikFinance*. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6962485/pemda-disebut-masih-jarang-pakai-kartu-kredit-pemerintah-ada-apa>
- Harits, T. M. (2021). Konflik Norma Dalam Pengaturan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurist-Diction*, 4(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v4i2.25788>
- Haryono. (2020). Analisis Penerapan Sistem Transaksi Non Tunai dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Kabupaten Landak). *JAAKFE UNTAN (Jurnal Audit Dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 9(2). <https://doi.org/10.26418/jaakfe.v9i2.43768>
- Mangalindung, G. H., & Ali, H. (2023). Pengaruh Teknologi Informasi, Kualitas Informasi dan Dukungan Manajemen Puncak terhadap Sistem Informasi Keuangan. *Jurnal Manajemen Dan Pemasaran Digital (JMPD)*, 1(4). <https://doi.org/10.38035/jmpd.v1i3>
- Maulana, M., Munawar, Y., & Sawitri, F. (2024, November 19). Kartu Kredit Pemerintah Daerah: Tinjauan Peluang dan Risiko. *The WAY Academy*. <https://wayacademy.id/2024/11/19/kartu-kredit-pemerintah-daerah-tinjauan-peluang-dan-risiko/>
- Mujianur, A., Maslichah, & Fakhriyyah, D. D. (2025). Pengaruh Literasi Keuangan, Kemudahan, Keamanan, dan Lifestyle Terhadap Penggunaan Sistem Digital QRIS. *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1).
- Sitorus, N. I. B., & Sari, L. (2021). Kolaborasi Stakeholder Pariwisata dalam Pengelolaan Akomodasi di Desa Wisata Kabupaten Purwakarta di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(9). <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i9.403>

Sriyani, Samudra, I. K. B., & Syahputra, B. D. A. (2022). Implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Amlapura. *Jurnal Manajemen Retail Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.33050/jmari.v3i1.2166>